

Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Vol. 1 No. 3, Desember 2014: 135-142
ISSN : 2355-6226

PERGURUAN TINGGI, PERAN PEMERINTAH DAN PENGEMBANGAN BLUE ECONOMY

Asep Saefuddin

Rektor Universitas Trilogi

Jl. Taman Makam Pahlawan, No. 1 Kalibata, Jakarta Selatan 12760

E-mail : asaefuddin@gmail.com

RINGKASAN

Ekonomi Biru sebagai pengarusutamaan pembangunan nasional mengintegrasikan pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut secara berkelanjutan yang saat ini masih terus dikembangkan. Ekonomi biru akan berlanjut mendorong berbagai stakeholder, pemerintah, perguruan tinggi, bisnis, dan masyarakat untuk terus menerus mengeksplorasi peluang aplikasi ekonomi biru dan strategi operasional didalam proses industrialisasi bidang kelautan dan perikanan. Ekonomi biru memerlukan aplikasi pengetahuan dan dukungan teknologi. Pelaksanaannya dalam bidang kelautan dan perikanan membutuhkan inovasi tepat guna, yang tidak hanya mampu untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan, tetapi juga lebih nyata dalam inovasi sistem produksi. Peran perguruan tinggi lebih proaktif dalam mendorong penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pengabdian masyarakat sebagai instrumen untuk melahirkan inovasi bernilai ekonomi dalam konsep Ekonomi Biru. Selanjutnya peran pemerintah daerah sangat diharapkan sebagai badan pengatur regulasi dan fasilitasi kepada industri (khususnya kepada industri kreatif kecil dan menengah).

Kata kunci : ekonomi biru, pemberdayaan, masyarakat pesisir, kelautan, perikanan

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) dan inovasi adalah kunci untuk mampu bersaing dalam trend perubahan ekonomi dunia.
- ◆ Ekonomi Biru mencakup pengembangan kawasan, komoditas, inovasi teknologi dan sumber daya manusia serta pengawasan pengelolaan sumber daya alam.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Peran Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi di daerah sangat diharapkan agar wawasan *Blue Economy* atau Ekonomi Biru ini dapat menjadi kebijakan, peraturan daerah hingga turunannya dalam wujud program-program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- ◆ Meningkatkan kerjasama antara masyarakat,

perguruan tinggi, pemerintah dan swasta sehingga gerakan-gerakan ekonomi lokal dapat memberikan manfaat terbaik untuk kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

I. PENDAHULUAN

Indonesia perlu mengubah sudut pandang atau paradigma pembangunan ekonomi agar mampu berkompetisi, baik dalam skala lokal, regional maupun dunia. Perubahan paradigma pembangunan ekonomi dengan orientasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dibangun melalui inovasi teknologi yang menitikberatkan pada integrasi ekosistem. Sementara itu peningkatan produktivitas dan keunggulan kompetitif diarahkan untuk mendukung kelestarian dan kemampuan keberlanjutan daya dukung lingkungan dan potensi sumberdaya alam dan pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan, serta upaya pengentasan kemiskinan dan keterkaitan dengan ekonomi global. Disisi lain, *trend* pembangunan ekonomi di masa mendatang akan sangat mengintegrasikan perekonomian lokal, regional dan global, yang diwarnai ketatnya persaingan antar pelaku ekonomi.

Akumulasi ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempercepat transformasi dunia, termasuk perubahan paradigma ekonomi global menuju suatu ekonomi berkelanjutan. Paradigma baru yang telah dikembangkan saat ini adalah *Blue Economy* atau Ekonomi Biru adalah konsep dinamis, berupa pendekatan pembangunan terakhir yang saat ini masih terus dikembangkan, bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi,

kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan, suatu model ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Mengapa pendekatan *Blue Economy* atau Ekonomi Biru diperlukan? Dan bagaimana peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam mendorong inovasi dalam implementasi Ekonomi Biru di Indonesia? Paper ini ingin memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana pendekatan Ekonomi Biru, rekomendasi apa yang dapat diaplikasikan dalam mendorong Perguruan Tinggi dan Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah berperan aktif di dalamnya.

II. BLUE ECONOMY, POLA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Situasi ekonomi Indonesia dapat mempengaruhi kinerja ekonomi global (kekuatan ekonomi global). Hal ini diprediksi dalam *The Wealth Report 2013* (www.thewealthreport.net), bahwa pada tahun 2050 Indonesia akan berada pada posisi 10 besar negara paling berpengaruh dalam ekonomi dunia (berdasarkan nilai prediksi ranking GDP pada *Purchasing Power Parity/PPP*). Salah satu faktor kunci untuk keberhasilan ekonomi ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan baru dihasilkan. Ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) dan inovasi adalah kunci untuk mampu bersaing dalam *trend* perubahan ekonomi dunia. Dijelaskan pada Gambar 1 pergerakan perilaku ekonomi mulai dari ekonomi berbasis industri, kemudian bergerak pada ekonomi teknologi tinggi (*knowledge-economy*) dengan mekanisasi produksi, dan akhirnya menuju kepada ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi (ilmu pengetahuan dan

teknologi), yang menjadi pemenang adalah mereka yang mampu untuk menerapkan inovasi pada produk dan pelayanan. Inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi bernilai ekonomi dengan memasukkan elemen-elemen strategi pertumbuhan, strategi kompetitif, proposisi nilai, segmentasi pasar, model pendapatan dan struktur rantai nilai.

Penelusuran *trend* global menuju kepada enam aspek pembangunan besar jangka panjang yang membentuk dunia kita, yaitu: 1) Peningkatan kekuasaan pasar-pasar baru. Saat ini, pasar yang baru muncul bertindak sebagai mesin pertumbuhan, dan efek jangkauannya yang cukup jauh berlanjut memainkan peranan yang penting, namun risikonya juga sering tidak diperhitungkan. Untuk itu mengambil manfaat dari peluang pasar yang baru muncul membutuhkan perencanaan yang hati-hati. 2) Teknologi “bersih” menjadi suatu keunggulan kompetitif. Berbagai pemerintah dan lembaga berlomba mengumumkan rencana untuk menurunkan jejak karbonnya. Gerakan menuju teknologi “bersih” bisa merupakan representasi suatu revolusi industri kedua yang akan memiliki efek sebesar yang pertama. 3) Perbankan global mencari strategi pemulihan melalui transformasi. Sistem keuangan global saat berada pada kondisi mengalir. Ketidakpastian situasi keuangan saat ini

memiliki baik peluang maupun resiko untuk lembaga keuangan, diperlukan alternatif manajer aset dan jenis usaha lainnya yang memerlukan dana untuk memenuhi tujuan pertumbuhan. 4) Pemerintah mendorong hubungan kerjasama dengan sektor swasta. Tahun-tahun belakangan ini merupakan penyesuaian ulang antara ekonomi pembangunan dan ekonomi baru, antara sektor publik dan sektor swasta, dan antara lembaga global dan suatu negara. Penyesuaian ini akan terus berlanjut dengan pendefinisian ulang peran pemerintah, lembaga dan organisasi dalam dunia pasca krisis ini. 5) Inovasi teknologi yang cepat menciptakan suatu dunia yang cerdas dan *mobile*. Teknologi “cerdas” menawarkan janji untuk akses langsung pada perawatan kesehatan dan pendidikan, dan mengaburkan batas antar industri. Kekuatan individual akan berkembang dan pesaing-pesaing baru akan bermunculan, tentu akan mengganggu pasar industri dan menciptakan model bisnis baru. 6) Pergerakan demografi merubah angkatan kerja global. Perusahaan global akan menghadapi tantangan tersebut, walaupun populasi global meningkat, perusahaan tersebut harus memperkerjakan tenaga dari angkatan kerja yang semakin sedikit terkait dengan populasi yang menua. Keenam aspek tersebut disajikan pada Gambar 2 Pendorong perubahan ekonomi global.



Sumber : Situngkir, H (2008)
Gambar 1. Pergerakan Sistem Ekonomi



Sumber: <http://oldrbd.doingbusiness.ro>, (2011)

Gambar 2. Pendorong Perubahan Ekonomi Global

Ekonomi global saling terkait sangat erat, dimana perusahaan, pemerintah dan industri segera diharuskan untuk bekerjasama. Karakteristik pembangunan berkelanjutan merupakan pilihan tepat untuk mengantisipasi perubahan tersebut, karena mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologis dan sosial. Haris (2000) dalam Fauzi (2004) memandang bahwa konsep keberlanjutan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi berkelanjutan harus mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan dan menghindari ketidakseimbangan antar sektor yang dapat menghancurkan produksi pertanian dan industri.
2. Keberlanjutan lingkungan/ekologi. Sistem keberlanjutan lingkungan harus mampu menjaga kestabilan sumberdaya alam, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi lingkungan. Konsep ini juga melibatkan

pemeliharaan biodiversitas, stabilitas atmosfer, dan fungsi-fungsi ekosistem yang tidak dikategorikan sebagai sumberdaya ekonomi.

3. Keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial didefinisikan sebagai suatu sistem yang mampu untuk mencapai kualitas, menyediakan pelayanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, akuntabilitas gender dan politik.

Konsep Ekonomi Biru mengundang komunitas global untuk merubah bagaimana pengelolaan sumberdaya alam secara optimal, berkelanjutan dan dengan cara yang bijaksana. Esensi Ekonomi Biru (Pauli, 2010) adalah : a) *Belajar dari Alam* : pembelajaran dari alam, bekerja sesuai dengan apa yang telah disediakan oleh alam secara efisien tanpa mengurangi bahkan memperkaya sumberdaya alam tersebut (perubahan dari kelangkaan menuju kelimpahan/ *from scarcity to abundance*). b) Logika Ekosistem, bagaimana ekosistem dimodelkan dalam Ekonomi Biru, misalnya seperti aliran air dari

pegunungan yang membawa unsur hara dan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan untuk seluruh komponen ekosistem (limbah dari sesuatu dapat menjadi makanan untuk makhluk lainnya, limbah dari suatu proses menjadi bahan mentah/sumber energi untuk proses lainnya). c) Terinspirasi dari 100 Inovasi, telah dikumpulkan 100 inovasi ekonomi praktis yang menginspirasi Ekonomi Biru dengan model sistem kerja ekosistem. Ekosistem selalu bekerja dari tingkat efisiensi tertinggi untuk aliran unsur hara dan energi tanpa buangan emisi dan limbah, untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seluruh komponennya.

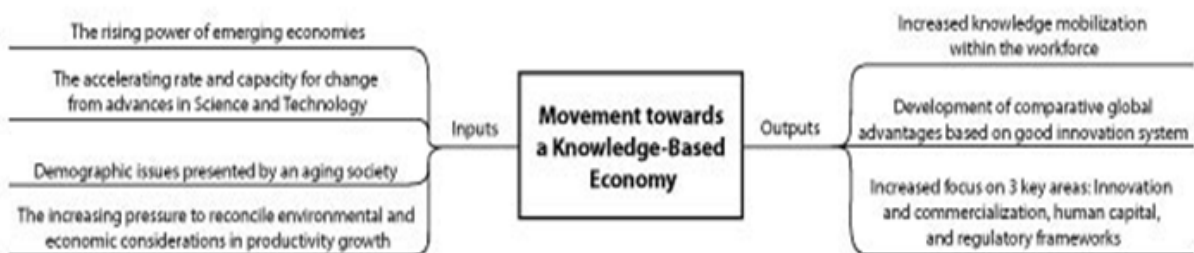
Ekonomi Biru telah diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2013 sampai 2025. Ekonomi Biru sebagai pengarusutamaan pembangunan nasional mengintegrasikan pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut secara berkelanjutan. Ekonomi biru akan berlanjut mendorong stakeholder, pemerintah, bisnis, perguruan tinggi dan masyarakat untuk terus menerus mengeksplorasi peluang aplikasi Ekonomi Biru dan strategi operasional didalam proses industrialisasi bidang Kelautan dan Perikanan. Ekonomi Biru memerlukan aplikasi pengetahuan dan dukungan teknologi. Pelaksanaannya dalam bidang Kelautan dan

Perikanan membutuhkan inovasi tepat guna, yang tidak hanya mampu untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan, tetapi juga lebih nyata dalam inovasi sistem produksi.

III. PERAN PEMERINTAH DAN PERGURUANTINGGI

Pada era globalisasi dengan ekonomi berbasis sasar teknologi membutuhkan kerjasama yang kuat antar stakeholder dalam pembangunan regional. Seluruh sektor perlu dipetakan dan dianalisis untuk menghasilkan prioritas yang tepat dalam pembangunan regional. Selain itu, kerjasama internal antar instansi dalam pemerintah daerah dan kerjasama eksternal dengan institusi lokal lainnya sangat penting untuk melaksanakan pembangunan yang terintegrasi. Ilmu pengetahuan yang telah tersedia di pendidikan tinggi dapat ditularkan pada berbagai institusi lokal. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi untuk peningkatan kapasitas stafnya dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kearifan lokal, terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Gambar 3 pergerakan input-output dalam *knowledge economy*.

Hubungan antar pihak dalam suatu kerjasama perlu diperkuat dengan partisipasi pemerintah,



Sumber: <http://www.global-knowledge-based-economy>

Gambar 3. Pergerakan input-output dalam knowledge based economy

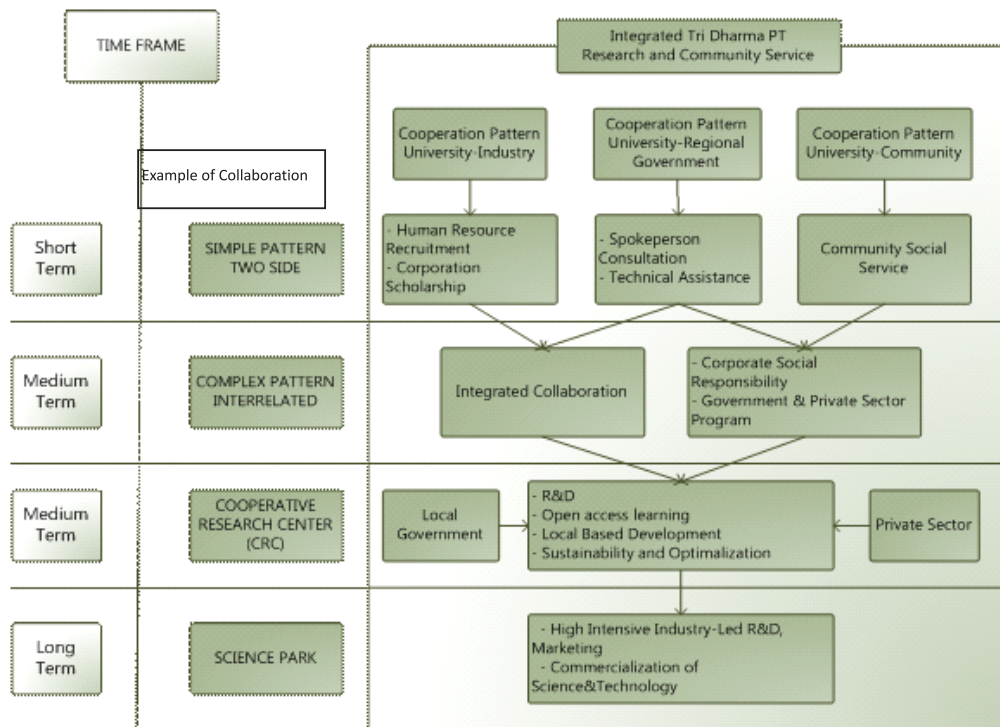
perguruan tinggi dan industri (UKM dan industri besar) (Plucknett, 1990). Kerjasama dengan model Peneliti, Pemerintah, Industri harus mampu memperkuat dan membawa program litbang lebih dekat kepada kebutuhan penggunanya. Secara bersamaan, dukungan pendanaan dan kebijakan pemerintah menjadi lebih akurat dan bermanfaat. Terminologi kerjasama yang telah dikenal adalah ABG-C (*Academics, Business and Government for Community prosperity*).

Pemerintah terus mencari upaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi regional dengan meningkatkan laju transfer hasil penelitian dari perguruan tinggi kepada industri, perencanaan regional dan aktivitas lain dalam pembangunan regional terutama pada aspek ekonomi dengan memperhatikan perspektif sosial dan lingkungan. Pendidikan tinggi dengan dedikasi dan agenda riset yang kuat telah menjadi pemain penting dalam pembangunan (ekonomi) regional dan

global. Materi utama dalam *knowledge-based economic* adalah modal, inovasi teknologi, kemampuan teknis tenaga kerja dan kewirausahaan. Penelitian di dalam kampus distimulasi oleh kebutuhan regional dan global dapat menghasilkan kreativitas dan ide-ide yang diperlukan untuk penyelesaian masalah, transfer teknologi dan mekanisme terobosan. Ekonomi berbasis pengetahuan membutuhkan kemitraan mutual antara perguruan tinggi dan industri termasuk UKM.

Selain itu pemerintah daerah dapat memainkan peran dalam hukum dan regulasi terkait dengan implementasi Ekonomi Biru, sebagai berikut :

1. Memonitor keamanan produk yang diperdagangkan (baik pada tingkat lokal maupun global)
2. Kebijakan dan peraturan perundangan yang mendorong penemuan inovasi, dan investasi pada industri kreatif.
3. Kebijakan untuk kerjasama antara pihak yang efektif.



Gambar 4. Contoh Pola Kerjasama antara Perguruan Tinggi, Pemeintan Daerah dan Masyarakat

PENERAPAN DALAM LINGKUP EKONOMI LOKAL

Dalam kondisi yang nyata gagasan Ekonomi Biru sebenarnya telah banyak dipraktekkan sebagai ekonomi kerakyatan di Indonesia dan memungkinkan semua pihak secara sederhana mengolah bahan produksi lokal dengan teknologi sederhana (<http://www.damandiri.or.id>). Di beberapa daerah, contohnya dalam kegiatan ekonomi (Pos Pemberdayaan Keluarga) POSDAYA, telah dimulai dengan pengembangan kolam ikan untuk petani nelayan yang biasa menangkap ikan dari laut, suatu proses petik, olah, jual yang menguntungkan dipraktekkan. Kolam-kolam ikan yang biasa memetik ikan hasil budidayanya dan langsung dijual, dengan pelatihan sederhana dan penggunaan alat teknologi sederhana, maka dapat mengolah ikan tersebut menjadi abon ikan, nugget dan keripik ikan, yang mempunyai daya tahan lebih lama dan menghasilkan harga jual yang lebih tinggi. Sistem ekonomi biru tersebut tidak menghasilkan banyak limbah sisa tetapi justru membawa keuntungan yang lebih tinggi.

Berbagai kegiatan ekonomi POSDAYA tersebut diantaranya (<http://www.gemari.or.id>) : 1) Pelatihan pengolahan lele segar kepada peternak ikan lele menjadi sate lele, abon lele, keripik lele, dan jenis produk berbahan baku lele lainnya dan pemanfaatan sisa limbah lele berupa duri dan lainnya masih bisa digerus untuk campuran pakan lele; 2) Posdaya Plamboyan di Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat memiliki produk unggulan yaitu panganan kripiK Kadedemes. Makanan ini terbuat dari limbah kulit singkong yang digarap Nani Yulianingsih bersama kaum ibu dari Posdaya Plamboyan. Kulit singkong biasanya selalu terbuang karena tak berguna. Tapi di Posdaya

Plamboyan justru menjadi uang karena berhasil diolah menjadi keripik; 3) Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Serang, Banten telah merintis pembinaan untuk anggota Posdaya di Kabupaten Pacitan untuk mengembangkan Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik (Busmetik) sebagai percontohan kepada daerah lain yang mempunyai potensi budidaya udang. Pengembangan teknologi Busmetik dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi produk hasil perikanan tersebut yang makin diminati pasar lokal dan internasional. Dengan teknologi Busmetik maka akan lebih efisien pada pemberian pakan dan masa panen lebih singkat yaitu tiga siklus per tahun dengan hasil lebih banyak dan berkualitas. Dengan demikian, berbagai usaha POSDAYA yang dilakukan tentu mengacu kepada prinsip ekonomi biru.

Penerapan prinsip Ekonomi Biru di Indonesia antara lain telah diinisiasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menjalin hubungan kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) untuk pelaksanaan sembilan program yang akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2014. Sembilan program tersebut merupakan langkah lanjutan dari nota kesepahaman bersama (MoU) antara KKP dan FAO yang telah ditandatangani di Jakarta, 27 Mei 2013. Sembilan program kerja sama KKP-FAO ini berguna untuk menerapkan konsep ekonomi biru di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut antara lain adalah Program Pengembangan Pedesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pengelolaan dan Pembangunan Sumber Daya Ikan di Palembang, serta kerja sama Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (CTI). Program ini merupakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari berbasis Ekonomi Biru

mencakup pengembangan kawasan, komoditas, inovasi teknologi dan sumber daya manusia serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berbagai contoh implementasi sistem ekonomi lokal tersebut adalah merupakan cerminan dari konsep ekonomi biru. Dengan kerjasama antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah dan swasta maka gerakan-gerakan ekonomi lokal tersebut dapat memberikan manfaat terbaik untuk kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Inisiasi atau ide bisa hadir dari pihak mana saja, apakah dimulai dari pemerintah, dari masyarakat, swasta atau dari pihak perguruan tinggi/sekolah. Peran masing-masing pihak dapat dijalankan seperti yang dijelaskan pada skema diatas. Oleh karena itu, Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi di daerah harus dirangkul agar wawasan *Blue Economy* atau Ekonomi Biru ini dapat menjadi warna kebijakan, peraturan daerah hingga turunannya dalam wujud program-program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

REFERENSI

- Plucknett, Smith., Ozgediz, 1990. *Networking in International Agricultural Research*. Cornell University Press.
- Fauzi. 2000. <http://bmjanfisipunsoed.blogspot.com/2010/10/prinsip-prinsip-dan-Implementasi.html>
- Pauli, Gunther. 2010. *The Blue Economy*. www.theblueeconomy.org.
- http://www.damandiri.or.id/index.php/artikel/detail/219_mempersiapkan_ekonomi_biru
- <http://www.gemari.or.id/listartikel.php?idedisi=162&kat=38>
- <http://www.horizons.gc.ca/eng/content/maximizing-canada%E2%80%99s-engagement-global-knowledge-based-economy-2017-and-beyond%C2%A0>
- <http://infoakuakultur.blogspot.com/2013/04/wacana-konsep-inspiratif-blue-economy.html>
- <http://oldrbd.doingbusiness.ro/ro/7/articole-ultima-editie/all/490/tracking-global-trends-how-six-key-developments-are-shaping-the-business-world,May2011>
- Situngkir, H (2008) *Evolutionary Economics celebrates Innovation and Creativity based Economy*, Working Paper, Bandung Fe Institute.